



KATA PENGANTAR

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah maka sebagai rangkaian dokumen perencanaan pembangunan daerah, Dinas Perhubungan Kota Pontianak menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2022 (Tahun ke-3) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020 s/d 2024.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan merupakan penyesuaian dan perubahan terhadap RENJA awal/murni tahun 2022 yang disusun pada tahun berjalan. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 memberikan gambaran terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan penyesuaian terhadap kondisi saat ini dan berdasarkan prioritas kebutuhan pencapaian tujuan Perangkat Daerah pada tahun 2022 dengan indikator output dan indikator outcomes yang akan dicapai.

Dalam penyusunan Renja Perubahan ini, masukan dan saran tentunya sangat diharapkan untuk dapat lebih menyempurnakan RENJA menuju Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang responsive dan aspiratif.

Pontianak, Agustus 2022

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Pontianak,

Dra. Hj. UTIN SRI LENA CANDRAMIDI .M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680410 199503 2 006



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-5
1.4. Sistematika Penulisan	I-6
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022	II-1
III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	III-1
3.1. Rencana Kerja	III-1
3.2. Pendanaan	III-16
IV. PENUTUP	IV-1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan Tata Cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana–rencana pembangunan baik dalam Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan yang dilaksanakan oleh unsur Penyelenggara Negara dan Masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang menuangkan langkah-langkah dan kebijakan yang responsive terhadap perubahan yang terjadi baik yang berhubungan dengan kompleksitas lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Selain itu Renja Perangkat Daerah merupakan Dokumen yang mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan salah satu dokumen yang menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan.

Meningkatnya tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Perhubungan Kota Pontianak untuk mempersiapkan diri agar eksis dan berhasil dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan senantiasa mengupayakan perubahan-perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus di susun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat menyajikan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil atau manfaat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk itu Satuan Kerja Perangkat Daerah Perlu melakukan penyusunan terhadap Rencana Kerja (Renja) Tahun Berjalan sebagai evaluasi dan penyesuaian terhadap perubahan Kegiatan dan proses penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2022 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja



- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
 15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
 16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);
 17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191).



18. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 123 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 123)
19. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020-2024;
20. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024;
21. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2022 disusun dengan maksud menyiapkan dokumen sinkronisasi dengan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak dan menjadi pedoman bagi Dinas Perhubungan Kota Pontianak untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2022.

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2022 adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintah serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.



1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kota Pontianak disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) serta Sistematika Penulisan.

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun berjalan (tahun 2022) hingga pelaksanaan pada Triwulan II, mengacu pada APBD murni tahun berjalan (2022), yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD Tahun 2022 hingga Triwulan II.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini memuat uraian tentang Rencana Kerja yaitu Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan serta Pendanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun Berjalan.

BAB IV. PENUTUP

Dalam Bab ini berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022

Dalam rencana jangka waktu 5 tahun yaitu 2020-2024, dan hingga Triwulan ke III tahun ketiga (2022) atau tahun berjalan, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan berdasarkan program-program strategis untuk mencapai visi dan misi pembangunan Bidang Perhubungan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun sasaran strategis serta program yang dilaksanakan pada tahun 2022 oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak yaitu sebagaimana berikut :

1. Sasaran ***Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik***, yang dicapai melalui pelaksanaan Program :
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
2. Sasaran ***Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan***, yang dicapai melalui pelaksanaan Program :
 - 1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Sasaran ***Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan***, yang dicapai melalui pelaksanaan Program :
 - 1) Program Pengelolaan Pelayaran

Adapun secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Program	Anggaran Murni (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.828.735.816
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	29.990.721.250
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	2.294.953.200
	Total	45.114.410.266



Untuk Anggaran tahun 2022 analisa penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan hanya terbatas sampai dengan triwulan II (juni) karena merupakan tahun berjalan yang mana pencapaian kinerja yaitu sebesar 43,66%.

Adapun secara rinci pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan dan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Perhubungan hingga Triwulan II pada tahun 2022 (tahun berjalan), sebagaimana berikut ini :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1.1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan yaitu jumlah perlengkapan jalan dan pendukung lalu lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan adalah 8 jenis perlengkapan jalan dari target 18 jenis.

1.1.1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini telah terealisasi Rp. 797.653.900 dari target anggaran Rp. 1.861.448.256 atau 42,85%. Capaian realisasi fisik adalah 3 jenis yaitu pengecatan marka jalan, zebra cross dan zona selamat sekolah (ZoSS) dari target fisik 8 jenis.

1.1.2. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini telah terealisasi Rp. 246.269.278 dari target anggaran Rp. 2.440.555.715 atau 10,09%. Capaian realisasi fisik yang telah dilaksanakan adalah pengadaan dan pemasangan traffic light.

1.1.3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Sub Kegiatan ini telah terealisasi Rp. 10.475.965.476 dari target anggaran Rp. 21.138.153.077 atau 49,55%. Realisasi fisik 5 jenis yaitu perlengkapan PJU jalan lingkungan, perlengkapan PJU Tahap I, pemeliharaan cctv/atcs, pemeliharaan flashing light dan pemeliharaan traffic light dari target fisik 8 jenis.



1.2. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.

Indikator kegiatan yaitu jumlah kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang telah dilakukan sampai dengan triwulan II adalah 2 kegiatan.

1.2.1. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan ini hingga triwulan II belum terealisasi.

1.2.2. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/ Kota.

Sub Kegiatan ini telah terealisasi Rp. 401.819.300 dari target anggaran Rp. 938.083.600 atau 42,83%. Realisasi fisik adalah 25 lokasi yang dilakukan pengawasan dan pengendalian.

1.2.3. Forum Lalu Lintas dan Angkutran Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini telah terealisasi Rp. 43.220.000 dari target anggaran Rp. 118.200.000. Realisasi fisik 5 bahan kebijakan yang telah dihasilkan sampai dengan triwulan II dari target fisik 10 bahan kebijakan.

1.3. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator kegiatan yaitu jumlah angkutan orang yang tersedia adalah 10 unit.

1.3.1. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan ini telah terealisasi Rp. 208.227.496 dari target anggaran Rp. 686.812.400 atau 30,31%. Realisasi fisik telah terlaksana 10 unit kendaraan BRT.

1.3.2. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan ini telah terealisasi Rp. 27.049.500 dari target anggaran Rp. 66.844.200 Realisasi fisik 181 hari kegiatan pengendalian dan pengawasan dari target fisik 365 hari.



1.4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Indikator kegiatan yaitu jumlah lokasi penyelenggaraan dan pengawasan titik perparkiran sampai dengan triwulan II adalah 157 titik perparkiran.

1.4.1 Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan ini telah terealisasi Rp. 722.287.199 dari target anggaran Rp. 1.991.484.802 atau 36,26%. Realisasi fisik 157 titik parkir yang telah dilakukan pengawasan dari target fisik 300 titik.

1.5. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Indikator kegiatan yaitu jumlah kendaraan bermotor yang diuji sampai dengan triwulan II (juni) adalah sebanyak 5.593 unit kendaraan dari target 16.700 unit kendaraan atau 33,49%.

1.5.1. Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor

Sub Kegiatan ini telah terealisasi Rp. 197.437.000 dari target anggaran Rp. 281.779.770 atau 70,06%. Realisasi fisik 1 paket yaitu pembuatan halaman parkir Pengujian Kendaraan Bermotor, dari target fisik 2 paket.

1.5.2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sub Kegiatan ini telah terealisasi Rp. 132.559.650 dari target anggaran Rp. 283.029.930 atau 46,83%. Realisasi fisik yaitu pemeliharaan gedung uji kendaraan bermotor.

1.5.3. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sub Kegiatan ini telah terealisasi Rp. 29.857.400 dari target anggaran Rp. 83.799.500 atau 35,62%. Kegiatan pengawasan PKB telah dilaksanakan sebanyak 72 hari sampai dengan triwulan II dari target 144 hari.



2. Program Pengelolaan Pelayaran

2.1. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

Indikator kegiatan yaitu jumlah kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan pada pelabuhan dan angkutan penyeberangan. Sampai dengan triwulan II ada 2 kegiatan yang telah dilaksanakan dari target 3 kegiatan atau 66,66%.

2.1.1. Pembangunan pelabuhan sungai dan danau

Sub kegiatan ini tidak dilaksanakan atau di drop dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran.

2.1.2. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau

Sub Kegiatan ini telah terealisasi Rp. 248.611.300 dari target anggaran Rp. 758.941.200 atau 32,75%. Realisasi fisik 181 hari dari target fisik 365 hari.

2.1.3. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

Sub Kegiatan ini telah terealisasi Rp. 180.737.500 dari target anggaran Rp. 388.012.000 atau 46,58%. Realisasi fisik yaitu terlaksana selama 72 hari pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau dari target fisik 144 hari.

Untuk lebih rinci capaian kinerja hingga triwulan II Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :



Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Jumlah Lokasi penyelenggaraan dan pengawasan titik parkir	1200 titik	6.915.839.063	300 titik	1.343.133.718	300 titik	1.991.484.802	79 titik	255.239.526	78 titik	467.047.673				157 titik	722.287.199	457	2.065.420.917	25,4	19,9								
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi penyelenggaraan dan pengawasan titik parkir	1200 titik	6.915.839.063	300 titik	1.343.133.718	300 titik	1.991.484.802	79 titik	255.239.526	78 titik	467.047.673				157 titik	722.287.199	457	2.065.420.917	38,1	29,865								
																	Rata-rata capaian kinerja (%)	457,00	2.065.420.917,00	38,08	29,97								
																	Predikat kinerja	ST	ST	SR	SR								
		Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan														5.593 unit	359.854.050	17.273,00	848.981.847	24,4	27,0								
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji	67.500 unit	1.514.170.508	11.680 unit	489.127.797	16.700 unit	648.609.200	2.903 unit	229.356.600	2.690 unit	130.497.450				5.593 unit	359.854.050	17.273,00	848.981.847	24,4	27,0								
	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah sarana dan prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang disediakan	1 paket				2 paket	281.779.770	1 paket	197.437.000	0 paket					1 paket	197.437.000			0,0									
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat Pengujian yang dilakukan pemeliharaan	8 paket	1.225.636.927	2 paket	413.452.997	2 paket	283.029.930	1 paket	22.105.600	0 paket	110.454.050				1 paket	132.559.650	3	546.012.647	37,5	44,549								
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kegiatan Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor	576 Hari	288.533.581	134 Hari	75.674.800	144 Hari	83.799.500	36 Hari	9.814.000	36 Hari	20.043.400				72 Hari	29.857.400	206	105.532.200	35,8	36,575								
																	Rata-rata capaian kinerja (%)	104,50	325.772.423,50	36,63	40,56								
																	Predikat Kinerja	S	ST	SR	SR								
	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan																												
3	Program Pengelolaan Pelayanan	Persentase Pembangunan Fasilitas yang dibangun, Pemeliharaan, dan Pengawasan pada Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	81 %	4.398.736.180	80 %	864.426.543	80 %	2.294.953.200	20 %	158.579.700	20 %	270.769.100				40 %	429.348.800	120,00	1.293.775.343	25,0	2,8								
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pengawasan pada Pelabuhan dan Angkutan Penyeberangan	11 kegiatan	4.398.736.180	2 kegiatan	864.426.543	3 kegiatan	2.294.953.200	2 kegiatan	158.579.700	0 kegiatan	270.769.100				2 kegiatan	429.348.800	4,00	1.293.775.343	25,0	19,3								
	Pembangunan pelabuhan sungai dan danau	Jumlah Fasilitas Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan yang dibangun	11 Paket		0		1 Paket	1.148.000.000	0 Paket		0 Paket					0 hari				0,0									
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	1460 hari	2.376.494.100	365 hari	557.642.543	365 hari	758.941.200	90 hari	101.252.700	91 hari	147.358.600				181 hari	248.611.300	546	806.253.843	37,4	33,936								
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah pengawasan pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	576 Hari	2.022.242.080	144 Hari	306.784.000	144 Hari	388.012.000	36 Hari	57.327.000	36 Hari	123.410.500				72 Hari	180.737.500	216	487.521.500	37,5	24,108								
																	Rata-rata capaian kinerja (%)	381,00	846.887.671,25	29,38	29,02								
																	Predikat kinerja	ST	ST	SR	SR								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								45.114.410.266		8.670.687.741		11.028.434.714					19.699.122.455												
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)																												29,385	18,11
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)																												SR	SR

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan
 Faktor penghambat pencapaian kinerja : Adanya kendala penyerapan anggaran dikarenakan masih menunggu anggaran perubahan
 Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *) : Mempercepat pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kasnya
 Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota

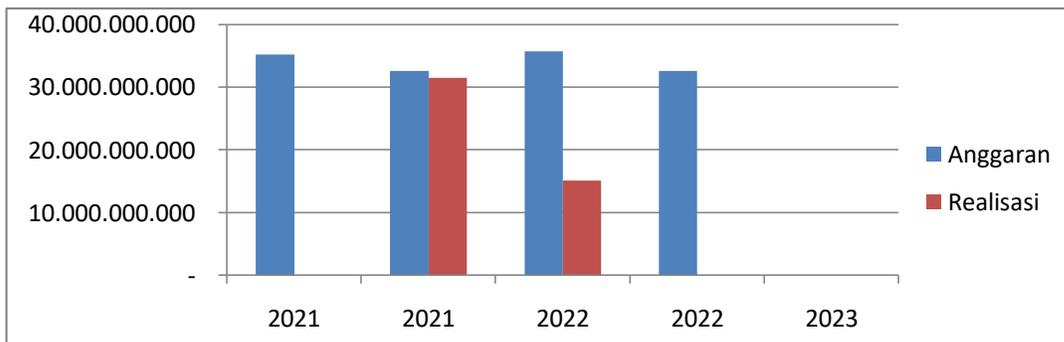


Dari alokasi anggaran dan realisasi anggaran tahun 2022 berdasarkan Pagu Indikatif sebagaimana yang dialokasikan untuk Dinas Perhubungan Kota Pontianak serta realisasi dan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel dan grafik Pagu anggaran sebagai berikut :

Total Alokasi dan Realisasi Anggaran (di Luar Gaji & Tunjangan)
Dinas Perhubungan Tahun 2020 – 2024

Tahun	2021 Murni	2021 Perubahan	2022	2022 (Rencana Perubahan)	2023	2024
Anggaran	35.298.296.496	32.675.163.295	35.774.092.748	32.643.423.642		
Realisasi		31.547.963.962	15.178.269.697 (Tw.II/Per Juni)			

Total Alokasi dan Realisasi Anggaran (di Luar Gaji & Tunjangan)
(Bidang Sekretariat dan Perhubungan)
Dinas Perhubungan Tahun 2020 – 2024 (Per Juni 2021)





BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Rencana Kerja

Berdasarkan isu-isu penting yang kemudian dirumuskan dan dianalisa, maka untuk memadukan, mengarahkan menggerakkan serta memberikan kekuatan, semangat dan komitmen dalam menjalankan roda organisasi sebelum menetapkan tujuan dan sasaran, maka ditetapkan suatu Visi dan Misi Dinas yang menjadi dasar dalam penetapan Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Adapun Visi Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

**“ TRANSPORTASI KOTA PONTIANAK YANG CERDAS, TERTIB,
AMAN, LANCAR DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN “**

Adapun penjelasan makna dari Visi Dinas Perhubungan Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

Dengan melihat dan memperhatikan permasalahan umum dan Tugas Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pontianak serta aspirasi dan masukan yang diterima, maka ditetapkanlah MISI Dinas Perhubungan Kota Pontianak selama Lima Tahun ke depan (Tahun 2020-2024) sebagaimana berikut :

- 1. MENINGKATKAN PROFESIONALISME SUMBER DAYA APARATUR YANG CERDAS DAN BERBUDAYA**
- 2. MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI, AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN**



3. **MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DAN PENATAAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN UNTUK MENCIPTAKAN KETERTIBAN DAN KELANCARAN LALU LINTAS DARAT DAN SUNGAI**
4. **MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DAN KESELAMATAN TRANSPORTASI**

Dari ke 4 (empat) misi yang ditetapkan tersebut di atas, maka ditetapkanlah tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan tersebut sebagaimana berikut :

1. Tujuan Dinas Perhubungan Kota Pontianak

Tujuan merupakan implementasi/penjabaran dari Visi, Misi Walikota serta telaahan terhadap arah dan kebijakan yang ingin dicapai oleh kementerian dan Dinas Perhubungan Propinsi yang dirumuskan dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai dan menghasilkan apa, dalam kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan Dinas Perhubungan Kota Pontianak merupakan permasalahan pokok bidang perhubungan yang ada di Kota Pontianak yang dirumuskan dan menjadi fokus dalam pengambilan kebijakan bidang perhubungan dan mendukung pencapaian Visi dan Misi Walikota. Jadi berdasarkan Permasalahan yang ada dan dipadukan dengan telaahan terhadap Visi dan Misi Walikota serta telaahan terhadap Renstra Kementerian, Dinas Perhubungan Propinsi dan telaahan terhadap RTRW Kota Pontianak, dapat dirangkum bahwa permasalahan pokok yang ada yang harus ditangani dan menjadi fokus untuk periode 5 tahun kedepan (2020-2024), dalam mencapai Misi ke 2 Walikota Pontianak yaitu "*Menciptakan Infrastruktur Perkotaan Yang Berkualitas dan Representatif*" adalah bagaimana Dinas Perhubungan Kota Pontianak berupaya memberikan pelayanan berupa peningkatan dan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana Bidang Perhubungan yang berkualitas dan representatif, serta meningkatkan Kualitas Transportasi di Kota Pontianak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka rumusan tujuan khusus Bidang Perhubungan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020–2024 berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Pontianak adalah :



“Meningkatkan Kualitas Transportasi di Kota Pontianak”

Dengan dirumuskannya tujuan Dinas Perhubungan Kota Pontianak, diharapkan akan dapat mendukung pencapaian dari Misi ke 2 Walikota Pontianak dalam menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif.

2. Sasaran Dinas Perhubungan Kota Pontianak

Sasaran Strategis adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran strategis merupakan arah atau fokus masalah yang akan dibenahi dari masalah pokok yang dirumuskan dalam tujuan yang akan dicapai pada periode 5 tahun.

Sasaran Strategis Dinas Perhubungan adalah sasaran dibidang perhubungan (transportasi darat dan sungai) yang dituangkan di dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020–2024. Adapun Sasaran Strategis Dinas Perhubungan dalam upaya pencapaian tujuan *“Meningkatnya Kualitas Transportasi di Kota Pontianak”*, yaitu :

- 1) Meningkatkan Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Meningkatkan Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan.

Secara ringkas Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Kualitas Transportasi	1.1. Meningkatkan Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan jalan	1.1.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak	B	B	B	B	B
		1.2. Meningkatkan Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan	1.2.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Pelabuhan Sungai Dan Dermaga Penyeberangan	80%	80 %	80 %	82 %	82 %



Untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan strategi. **Strategi** adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran dalam pencapaian Visi dan Misi. Adapun Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Pontianak juga akan ditempuh dengan menetapkan kebijakan-kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya..

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang di tetapkan oleh pihak yang berwenang untuk di jadikan pedoman bagi setiap organisasi, agar adanya keterpaduan dan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah di tetapkan.

Adapun Strategi dan Kebijakan yang di terapkan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 sebagaimana berikut :

1. **Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Upaya pencapaian Sasaran ini dilakukan melalui 5 Strategi, yaitu :

- a. **Strategi 1** : Meningkatkan perlengkapan Jalan di Wilayah Kota Pontianak
- b. **Strategi 2** : Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- c. **Strategi 3** : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- d. **Strategi 4** : Penyelenggaraan dan Pengawasan Fasilitas Parkir
- e. **Strategi 5** : Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi 1 sampai dengan strategi 5, yaitu :

- a. Menyediakan Perlengkapan Jalan di Wilayah Kota Pontianak
- b. Melaksanakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- c. Menyediakan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- d. Menerbitkan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
- e. Penyelenggarakan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor



2 Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan

Upaya pencapaian Sasaran ini dilakukan melalui 1 Strategi, yaitu :

- a. **Strategi 6** : Pelaksanaan Pembangunan, Pengoperasian, dan Pengawasan Pelabuhan Sungai dan Danau.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan Strategi 6, yaitu :

- a. Membangun dan Menerbitkan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

Dari 6 strategi dengan beberapa arah kebijakan yang dituangkan di atas, akan menjadi pedoman bagi Dinas Perhubungan dalam menetapkan program-program maupun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa periode 2020-2024, sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Walikota tahun 2020-2024.

Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020-2024, secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel			
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN			
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024 DALAM PENCAPAIAN MISI 2 PEMERINTAH KOTA PONTIANAK			
VISI PEMERINTAH KOTA : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat.			
Misi II PEMERINTAH KOTA : Menciptakan Infrastruktur Perkotaan Yang Berkualitas dan Representatif.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan Kualitas Transportasi	1.1. Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1.1.1. Meningkatkan Perlengkapan Jalan di Wilayah Kota Pontianak	1.1.1.1. Menyediakan Perlengkapan Jalan di Wilayah Kota Pontianak
		1.1.2. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.2.1.1. Melaksanakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
		1.1.3. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.2.2.1. Menyediakan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		1.1.4. Penyelenggaraan dan Pengawasan Fasilitas Parkir	1.2.3.1. Menerbitkan Izin Penyelenggaraan dan Pengawasan Fasilitas Parkir
		1.1.5. Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.2.4.1. Menyelenggarakan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
	1.2. Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan	2.1.1. Pelaksanaan Pembangunan, Pengoperasian dan Pengawasan Pelabuhan Sungai dan Danau	2.1.1.1. Membangun dan Menerbitkan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau



Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak pada tahun 2022 disusun berdasarkan Isu strategis daerah dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu :

- ❖ Mengoptimalkan dan meningkatkan keterpaduan proses perencanaan dan penganggaran dengan memproporsionalkan prioritas belanja yang berbasis kinerja dan program yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- ❖ Mengutamakan belanja publik yang mampu memberikan dampak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- ❖ Mengoptimalkan sumberdaya yang ada dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan berkesinambungan.
- ❖ Efisiensi Anggaran dikarenakan defisit anggaran Kota Pontianak.

Adapun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pontianak
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Setelah											
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
215		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																
2151		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
215102		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
21510201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
2151020101	2.0.0.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	9 dokumen	9 dokumen	23 Dokumen	23 Dokumen	8,600,851	8,600,851	Pendapatan Bagi Hasil	Presentase tingkat	100 %	10,800,000
2151020102	2.0.0.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	8 dokumen	8 dokumen	23 Dokumen	23 Dokumen	6,437,300	6,437,300	Pendapatan Bagi Hasil	Presentase tingkat	100 %	10,000,000
2151020103	2.0.0.0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah yang Disusun	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 dokumen	6 dokumen	23 Dokumen	23 Dokumen	6,000,000	6,000,000	Pendapatan Bagi Hasil	Presentase tingkat	100 %	4,980,000
21510202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
2151020201	2.0.0.0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	9,340,317,518	9,333,095,918	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase tingkat	100 %	11,860,000,000
2151020203	2.0.0.0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	424,990,000	397,560,000	Pendapatan Bagi Hasil	Presentase tingkat	100 %	585,000,000
2151020207	2.0.0.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Ke Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jangka waktu uapnegnaynelenggaraan emademstienriastrasi keuangan perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	15 dokumen	15 dokumen	12 Bulan	12 Bulan	14,496,300	14,496,300	Pendapatan Bagi Hasil	Presentase tingkat	100 %	17,026,208



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2022							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)			Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2151060	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	10,000,000	Pendapatan Bagi Hasil	Presentase tingkat	100 %	12,000,000
2151069	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu pemenuhan/fasilitas kegiatan rapat-rapa koordinasi dan konsultasi SKPD	Jangka waktu sipenyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	57,447,000	57,447,000	Pendapatan Bagi Hasil	Presentase tingkat	100 %	120,000,000
2151061	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka Waktu dukung	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	51,200,000	48,800,000	Pendapatan Bagi Hasil	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	35,000,000
215107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											42,626,250	42,626,250			72,090,000	
2151075	Pengadaan Mebel	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah unit mebeleur	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 paket	1 paket	1 Paket	1 Paket	42,626,250	42,626,250	Pendapatan Bagi Hasil	Presentase tingkat	100 %	72,090,000
215108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											472,890,600	407,065,600			645,000,000	
2151081	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu penyediaan surat menyurat	Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Umum	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	10,000,000	Pendapatan Bagi Hasil	Presentase tingkat	100 %	10,000,000
2151082	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Umum	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	260,240,000	258,240,000	Pendapatan Bagi Hasil	Presentase tingkat	100 %	275,000,000



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
215102003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Umum	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %		0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	63,825,000	0	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase tingkat	100 %	110,000,000	
215102004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Umum	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	138,825,600	138,825,600	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase tingkat	100 %	250,000,000	
215102009	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											835,931,358	938,931,358				932,620,000		
215102001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 unit	1 unit	28 Unit	28 Unit	38,750,000	38,750,000	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	50,000,000	
215102002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	20 unit	20 unit	28 Unit	28 Unit	552,753,916	652,753,916	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	550,000,000	
215102006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	8 jenis	7 jenis	28 Unit	28 Unit	134,563,800	137,563,800	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase tingkat	100 %	147,500,000	
215102009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah unit rumah ge	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 unit	1 unit	28 Unit	28 Unit	94,842,000	94,842,000	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase tingkat	100 %	157,120,000	
215102010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah sarana dan pra	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 unit	1 unit	28 Unit	28 Unit	15,021,642	15,021,642	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase tingkat	100 %	28,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Sebelum	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
21 5 2	0 2.0 0	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)													29,990,721,250	28,046,558,144				34,142,190,000
21 5 2	0 2.0 02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota													25,440,157,048	23,885,015,859				29,996,298,000
21 5 2	0 2.0 01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan	Jumlah Prasarana Jalan yang Dibangun	Jumlah Perengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	2 paket	1 paket	16 Jenis	14 Jenis	1,861,448,256	898,160,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase Perengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan	80 %	0	0	
21 5 2	0 2.0 02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan	Jumlah Penyediaan Perengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan	Jumlah Perengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	8 jenis	7 jenis	16 Jenis	14 Jenis	2,440,555,715	1,851,082,782	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase Perengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan	80 %	4,268,940,000		
21 5 2	0 2.0 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Persentase Perengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang dilaksanakan	Jumlah Perengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	8 jenis	7 jenis	16 Jenis	14 Jenis	21,138,153,077	21,135,773,077	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Perengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan	80 %	25,727,358,000		
21 5 2	0 2.0 04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir													1,991,484,802	1,901,728,385				1,730,000,000
21 5 2	0 2.0 02	Koordinasi dan Sinkronisasi	Persentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar	Jumlah Lokasi penyelenggaraan dan pengawasan titik parkir	Jumlah Lokasi penyelenggaraan dan pengawasan titik parkir	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	300 titik	300 titik	300 Titik	300 Titik	1,991,484,802	1,901,728,385	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar	80 %	1,730,000,000		
21 5 2	0 2.0 05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor													648,609,200	641,981,300				335,250,000



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja										Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
21 52 05 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	Jumlah Sarana dan Prasarana	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji	Kota Pontianak, Se	80 %	80 %	2 paket	2 paket	16700 Unit	16700 Unit	281,779,770	281,779,770	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	80 %	0		
21 52 05 07	Pemeliharaan Sarana	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	Jumlah Alat Pengujian yang dilakukan pemeliharaan	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji	Semua Kab/Kota,	80 %	80 %	2 paket	2 paket	16700 Unit	16700 Unit	283,029,930	283,029,930	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	80 %	265,000,000		
21 52 05 00	Monitoring dan Evaluasi	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	Jumlah Kegiatan Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji	Kota Pontianak, Se	80 %	80 %	144 hari	144 hari	16700 Unit	16700 Unit	83,799,500	77,171,600	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	80 %	70,250,000		
21 52 06	Pelaksanaan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota										1,156,813,600	980,397,000					920,642,000		
21 52 06 01	Penataan Manajemen	Persentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar	Jumlah Dokumen hasil reayasa lalu lintas yang dibuat	Jumlah Kegiatan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas	Kota Pontianak, Se	80 %	80 %	1 dokumen	0 dokumen	3 Kegiatan	2 Kegiatan	100,530,000	0	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar	80 %	150,000,000		
21 52 06 04	Pengawasan dan Pengendalian	Persentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar	Jumlah lokasi yang dilakukan pengawasan dan reayasa lalu lintas	Jumlah Kegiatan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	25 lokasi	25 lokasi	3 Kegiatan	2 Kegiatan	938,083,600	906,397,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar	80 %	670,642,000		
21 52 06 05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Bidang LLAJ	Jumlah Kegiatan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas	Kota Pontianak, Se	80 %	80 %	10 bahan	10 bahan	3 Kegiatan	2 Kegiatan	118,200,000	74,000,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar	80 %	100,000,000		
21 52 09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										753,656,600	637,435,600					1,160,000,000		
21 52 09 01	Penyediaan Angkutan	Persentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar	Tersedianya unit Bus BRT Dalam Kondisi Baik.	Jumlah Angkutan Orang yang Tersedia	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	10 unit	10 unit	10 Bus	10 Bus	686,812,400	575,940,400	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar	80 %	1,090,000,000		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum			Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
21020920	Pengendalian dan Per	Persentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar	Jangka Waktu Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang	Jumlah Angkutan Orang yang Tersedia	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	365 hari	365 hari	10 Bus	10 Bus	66.844,200	61.495,200	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar	80 %	70,000,000		
21053		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN										2,294,953,200	1,127,878,200			3,206,973,792				
2105313		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau										2,294,953,200	1,127,878,200			3,206,973,792				
2105320	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Pembangunan Fasilitas yang dibangun, Pemeliharaan, dan Pengawasan pada Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan yang dibangun	Jumlah Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pengawasan pada Pelabuhan dan Angkutan Penyeberangan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	1 paket	0 paket	3 Kegiatan	2 Kegiatan	1,148,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pembangunan Fasilitas yang dibangun, Pemeliharaan, dan Pengawasan pada Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	80 %	2,041,973,792		
2105333	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Pembangunan Fasilitas yang dibangun, Pemeliharaan, dan Pengawasan pada Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	Jumlah pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	Jumlah Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pengawasan pada Pelabuhan dan Angkutan Penyeberangan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	365 hari	365 hari	3 Kegiatan	2 Kegiatan	758,941,200	758,941,200	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Pembangunan Fasilitas yang dibangun, Pemeliharaan, dan Pengawasan pada Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	80 %	600,000,000		
2105334	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Pembangunan Fasilitas yang dibangun, Pemeliharaan, dan Pengawasan pada Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	Jumlah pengawasan pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	Jumlah Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pengawasan pada Pelabuhan dan Angkutan Penyeberangan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	144 hari	144 hari	3 Kegiatan	2 Kegiatan	388,012,000	368,937,000	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Pembangunan Fasilitas yang dibangun, Pemeliharaan, dan Pengawasan pada Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	80 %	565,000,000		
TOTAL												45,114,410,266	41,976,519,560			53,184,440,000				



3.2 Pendanaan

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak, dalam upaya pencapaian Sasaran dan Tujuan yang ditetapkan. Program-program pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak tentunya sesuai dan sebagai upaya dalam pencapaian Visi dan Misi Dinas yang ditetapkan, yang mengacu kepada apa yang dicita-citakan oleh Pemerintah Kota Pontianak yang dituangkan dalam Visi dan Misi Kepala Daerah (Pemerintah Kota Pontianak).

Program-program pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak pada tahun 2022 sesuai dengan yang tertuang dalam DPA (Murni) tahun 2022 dengan prioritas kegiatan dan penyerapan aspirasi masyarakat, dengan total anggaran Rp. 45.114.410.266 (termasuk Gaji dan Tunjangan PNS), yang terdiri dari 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 12.828.735.816 dan 2 (dua) Program Pokok Pembangunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32.285.674.450.

Sedangkan berdasarkan RKPD Perubahan, Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang telah ditetapkan pagu indikatif adalah Rp. 41.976.519.560 (termasuk Gaji dan Tunjangan PNS) berkurang sebesar 6,95% atau sebesar Rp. 3.137.890.706 dari anggaran murni tahun 2022. Anggaran perubahan ini ditetapkan karena adanya efisiensi anggaran sehingga perlu penyesuaian anggaran pada seluruh Perangkat Daerah Kota Pontianak.

Dengan berdasar pada pertimbangan di atas maka Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebelum perubahan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 12.828.735.816 dan direncanakan mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 12.802.083.216 (berkurang Rp. 26.652.600 atau 0,21%).
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebelum perubahan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 29.990.721.250 dan direncanakan mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 28.046.558.144 (berkurang/turun Rp. 1.944.163.106 atau 6,48%).



3. Program Pengelolaan Pelayaran sebelum perubahan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 2.294.953.200 dan direncanakan mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 1.127.878.200 (berkurang/turun Rp. 1.167.075.000 atau 50,85%).

Adapun secara rinci Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mengalami perubahan pada anggaran perubahan untuk tahun anggaran 2022 sesuai plafon anggaran pagu indikatif perubahan yang ditetapkan, yaitu sebagaimana berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, tidak ada mengalami perubahan pada anggaran perubahan yaitu tetap dengan pagu Rp. 21.038.151 dengan rincian Sub Kegiatan antara lain :
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tidak mengalami perubahan dengan anggaran Rp. 8.600.851.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD mengalami perubahan dengan anggaran Rp. 6.437.300.
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mengalami perubahan dengan anggaran Rp. 6.000.000.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah mengalami perubahan pada anggaran perubahan yaitu dari anggaran Rp. 9.779.803.818 menjadi Rp. 9.745.152.218 (berkurang Rp. 34.651.600 atau 0,35% dari pagu murni), dengan rincian Sub Kegiatan antara lain :
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 9.340.317.518 menjadi Rp. 9.333.095.918.
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 424.990.000 menjadi Rp. 397.560.000.



- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tidak mengalami perubahan anggaran yaitu Rp. 14.496.300.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah mengalami perubahan yaitu adanya penurunan anggaran dari anggaran murni Rp. 378.682.250 menjadi Rp. 348.682.250 (berkurang Rp. 30.000.000 atau 7,9% dari pagu murni) pada anggaran perubahan, dengan rincian Sub Kegiatan antara lain :
- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya tidak mengalami perubahan anggaran yaitu Rp. 348.682.250.
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan pagu murni Rp. 30.000.000, namun tidak dianggarkan pada perubahan anggaran/di drop dikarenakan rasionalisasi anggaran.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah mengalami perubahan yaitu penambahan anggaran dari anggaran murni Rp. 1.297.763.389 menjadi Rp. 1.298.587.389 (bertambah Rp. 824.000 atau 0,06% dari pagu murni), dengan rincian Sub Kegiatan antara lain :
- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tidak mengalami perubahan anggaran yaitu Rp. 25.430.000.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor mengalami perubahan anggaran dari pagu murni Rp. 305.517.800 menjadi Rp. 308.741.800.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor tidak mengalami perubahan anggaran yaitu Rp. 468.778.989.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tidak mengalami perubahan anggaran yaitu Rp. 379.389.600.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan tidak mengalami perubahan anggaran yaitu Rp. 10.000.000.



- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD tidak mengalami perubahan anggaran yaitu Rp. 57.447.000.
 - Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 51.200.000 menjadi Rp. 48.800.000.
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tidak mengalami perubahan anggaran yaitu tetap sebesar Rp. 42.626.250, dengan rincian Sub Kegiatan antara lain :
- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel tidak mengalami perubahan anggaran yaitu Rp. 42.626.250.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mengalami perubahan yaitu penurunan dari anggaran murni Rp. 472.890.600 menjadi Rp. 407.065.600 (berkurang 65.825.000 atau 13,91% dari pagu murni), dengan rincian Sub Kegiatan antara lain :
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat tidak mengalami perubahan anggaran yaitu Rp. 10.000.000.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 260.240.000 menjadi Rp. 258.240.000.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu murni Rp. 63.825.000 namun tidak dianggarkan pada perubahan anggaran/di drop dikarenakan rasionalisasi anggaran.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor tidak mengalami perubahan anggaran yaitu Rp. 138.825.600.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mengalami perubahan yaitu adanya penambahan anggaran pada anggaran perubahan dari anggaran murni Rp. 835.931.358 menjadi Rp. 938.931.358 (bertambah Rp.



103.000.000 atau 12,32% dari pagu murni), dengan rincian Sub Kegiatan antara lain :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan tidak mengalami perubahan anggaran yaitu Rp. 38.750.000.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 552.753.916 menjadi Rp. 652.753.916.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 134.563.800 menjadi Rp. 137.563.800.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya tidak mengalami perubahan yaitu Rp. 94.842.000.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tidak mengalami perubahan yaitu Rp. 15.021.642.

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota mengalami perubahan dari anggaran murni Rp. 25.440.157.048 menjadi Rp. 23.885.015.859 (berkurang Rp. 1.555.141.189 atau 6,11% dari pagu murni), dengan rincian Sub Kegiatan antara lain :
 - Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 1.861.448.256 menjadi Rp. 898.160.000.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 2.440.555.715 menjadi Rp. 1.851.082.782.
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 21.138.153.077 menjadi 21.135.773.077.



2. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir mengalami perubahan yaitu penurunan dari pagu anggaran murni Rp. 1.991.484.802 menjadi Rp. 1.901.728.385 (berkurang Rp. 89.756.417 atau 4,5% dari pagu murni), dengan rincian Sub Kegiatan antara lain :
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 1.991.484.802 menjadi Rp. 1.901.728.385.

3. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor mengalami perubahan yaitu penurunan anggaran dari anggaran murni Rp. 648.609.200 menjadi Rp. 641.981.300 (berkurang Rp. 6.627.900 atau 1,02% dari pagu murni), dengan rincian Sub Kegiatan antara lain :
 - Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor tidak mengalami perubahan anggaran.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan tidak mengalami perubahan.
 - Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 83.799.500 menjadi Rp. 77.171.600.

4. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan mengalami perubahan berupa penurunan anggaran dari anggaran sebesar Rp. 1.156.813.600 menjadi Rp. 980.397.000 (berkurang Rp. 176.416.600 atau 15,25% dari pagu murni), dengan rincian Sub Kegiatan antara lain :
 - Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota tidak bisa dilaksanakan karena adanya rasionalisasi anggaran.
 - Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 938.083.600 menjadi Rp. 906.397.000.



- Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 118.200.000 menjadi Rp. 74.000.000.
5. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota juga mengalami perubahan yaitu dari anggaran murni Rp. 753.656.600 menjadi Rp. 637.435.600 (berkurang Rp. 116.221.000 atau 15,42% dari pagu murni), dengan rincian Sub Kegiatan antara lain :
- Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 686.812.400 menjadi Rp. 575.940.400.
 - Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 66.844.200 menjadi Rp. 61.495.200.

C. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

1. Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau mengalami perubahan pagu anggaran dari anggaran murni Rp. 2.294.953.200 menjadi Rp. 1.127.878.200 (berkurang Rp. 1.167.750.000 atau 49,15% dari pagu murni), dengan rincian Sub Kegiatan antara lain :
- Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang mana dalam Perubahan Rencana Kerja tidak jadi dilaksanakan karena adanya rasionalisasi anggaran yaitu sebesar Rp. 1.148.000.000.
 - Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau tidak mengalami perubahan.
 - Sub Kegiatan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 388.012.000 menjadi Rp. 368.937.000 (berkurang 19.075.000).





BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Perubahan adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) yang disesuaikan terhadap kondisi dan kebutuhan tahun berjalan yang menuangkan langkah-langkah dan kebijakan yang responsive terhadap perubahan yang terjadi baik yang berhubungan dengan kompleksitas lingkungan internal maupun lingkungan eksternal.

Rencana Kerja yang merupakan suatu proses yang mengarahkan para pemimpin Dinas beserta jajarannya dalam merealisasikan Visi dan Misi yang merupakan acuan dasar untuk pencapaian program, kegiatan dan kebijakan pada tahun yang ditetapkan. Dengan demikian, Rencana Kerja bagi Dinas Perhubungan merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan rencana di atasnya (Renstra OPD, RKPD dan RPJMD Kota Pontianak) serta memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

Meningkatnya tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Perhubungan Kota Pontianak untuk mempersiapkan diri agar eksis dan berhasil dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan senantiasa mengupayakan perubahan-perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus di susun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat menyajikan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil atau manfaat.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa berdasarkan hasil analisis kebutuhan, yaitu penyesuaian dari kebutuhan anggaran sesuai dengan pagu indikatif yang tertuang pada DPA Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Tahun 2022 yang ditetapkan, serta berdasarkan kondisi defisit anggaran yang terjadi, maka alokasi anggaran (pagu Indikatif) untuk



Anggaran Perubahan Dinas Perhubungan Kota Pontianak tahun 2022 setelah dilakukan analisis, evaluasi dan penyesuaian dengan pagu indikatif perubahan yang ditetapkan untuk Belanja Langsung Rp. 32.643.423.642 berkurang sebesar 8,75% atau sebesar Rp. 3.130.669.106 dari anggaran murni tahun 2022.

Program-program yang akan dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak tahun 2022 Anggaran Perubahan dengan total 3 Program, 13 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan yang terdiri dari 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Urusan Kesekretariatan) yang terdiri dari 7 kegiatan dan 23 Sub Kegiatan serta pada 2 (dua) Program Pokok Pembangunan Urusan Perhubungan yang terdiri dari 6 Kegiatan dan 13 Sub Kegiatan.

Untuk mencapai hasil yang diharapkan Dinas Perhubungan Kota Pontianak menerapkan manajemen Strategik sebagai langkah awal dalam menentukan strategi kedepan tentang apa yang akan dilaksanakan, bagaimana melaksanakannya serta evaluasi, untuk itu Dinas Perhubungan Kota Pontianak memiliki Misi, Visi, Tujuan dan Sasaran selaras dengan apa yang dituangkan dalam Renstra Kota dengan program dan kegiatan yang realistis sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan.

Dalam perjalanan waktu serta perkembangan dan perubahan kondisi baik ekonomi, sosial maupun perubahan kebijakan Pusat dan Daerah, Dinas Perhubungan Kota Pontianak tentunya akan melakukan perubahan dan penyesuaian jika program dan kegiatan yang diusulkan memang secara prinsip harus disesuaikan. Untuk itu masukan dan saran tentunya sangat kami harapkan untuk menjadikan Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang lebih baik.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PONTIANAK

Dra.Hj. UTIN SRI LENA CANDRAMIDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680410 199503 2 006



Lampiran